

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL
(Studi Kasus pada Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat)**

Mia Rachmawati

Abstract

The purposes of this research is to test the effects of General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Regional Own Revenue (PAD) on capital expenditure allocation. Purposive sampling method is uses in this research. This research uses 33 regency from Papua and West Papua Province. The data collected from the realization report APBD 2011-2015 period. The results testing show that DAK and PAD have positive significant effect on capital expenditure alloacation. However, DAU have no positive significant effect on capital expenditure alloacation.

Keyword : *General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Regional Own Revenue (PAD), Capital Expenditure.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi belanja modal. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 33 kabupaten dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Data yang dikumpulkan dari laporan realisasi APBD periode 2011-2015. Hasil uji menunjukkan bahwa DAK dan PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Namun, DAU tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Kata kunci : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemandirian daerah dalam pelayanan disektor publik untuk menciptakan kenyamanan masyarakat. Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang besar untuk peningkatan layanan publik agar meningkatkan daya tarik investor untuk membuka usaha di daerah (David & Priyo, 2007). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran dalam pencapaian

aset tetap serta aset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja daerahnya untuk melaksanakan rencana pembangunan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk mewujudkan kelancaran kegiatan pemerintahan, pemerintah daerah perlu megubah komposisi belanjanya (Darwanto & Yulia, 2007).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen dari

pendapatan dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DAU di berikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam membenahi tatanan daerah serta peningkatan pelayanan daerah untuk masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung dengan DAU yang diberikan untuk meningkatkan pelayanan daerahnya (David & Priyo, 2007). Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri dengan mengembangkan pendapatan daerahnya untuk mendanai peningkatan pelayanan daerah.

Pengertian DAK dalam Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan dapat membangun perekonomian nasional (Ni Luh Dina, dkk., 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah daerah melakukan berbagai investasi untuk meningkatkan PAD. Peneliti Verawaty, dkk. (2015) berpendapat bahwa peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah sehingga

kualitas pelayanan publik juga dapat semakin baik, tetapi dalam kenyataannya hal ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kenaikan PAD juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, oleh karena itu pemerintah daerah sebaiknya lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi daerah (Priyo, 2006).

Motivasi penelitian ini yaitu adanya perbedaan dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (David & Priyo, 2007). Hasil penelitian ini sejalan dengan Arbie (2013), Askam (2008) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Penelitian Verawaty, dkk. (2015) menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian Arbie (2013), Askam (2008) dan Ni Luh Dina, dkk. (2013) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan dalam penelitian Verawaty, dkk. (2015) menyatakan dana alokasi khusus tidak berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal. Terdapat perbedaan pendapat antara peneliti Mawarni, dkk. (2013) yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan Arbie (2013) menyatakan bahwa tidak berpengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Arbie (2013) didukung dengan adanya penelitian Farah (2011) yang menyatakan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian Mawarni, dkk. (2013) memperoleh bukti empiris dari pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Peneliti menggunakan data sekunder dari laporan APBD kabupaten/kota propinsi Aceh yang diperoleh dari departemen keuangan yang diakses melalui website www.djkd.depkeu.go.id. Hasil penelitian Mawarni, dkk. (2013) menunjukkan DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Askam (2008) melakukan penelitian pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2005. Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota yang berjumlah 326. Askam (2008) memfokuskan penelitiannya hanya pada tahun 2005. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Serta pada laporan realisasi APBD pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang diperoleh dari website Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Penelitian Askam (2008) menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

Penelitian Ni Luh Dina, dkk. (2014) mengambil sampel penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Data yang dianalisis bersumber dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kabupaten Buleleng periode 2006-2012. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PAD, DAU, DAK dan belanja modal sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif kausal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD pada kabupaten/kota di

daerah Buleleng berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian Verawaty, dkk. (2015) melakukan penelitian pada kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012. Metode pengambilan sampel dengan cara purposive sampling karena hanya akan mengambil beberapa kabupaten/kota yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan cara Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan program Statistical Product and Service (SPSS). Hasil penelitian Verawaty, dkk. (2015) menunjukkan PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Sedangkan pada variabel DAU dan DAK menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

2. Penurunan Hipotesis

DAU merupakan komponen dari dana perimbangan. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Verawaty, dkk., 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh David & Priyo (2007) pada daerah kabupaten dan kota se Jawa – Bali menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini sependapat dengan penelitian Darwanto & Yulia (2007) dan Askam (2008) variabel DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa transfer DAU dari pemerintah pusat di manfaatkan pemerintah daerah untuk membiayai belanja modal. Berdasarkan hasil riset diatas maka dirumuskan hipotesis yaitu:

H₁: Dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang

dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus daerah. Menurut Verawaty, dkk. (2015) DAK dari pemerintah pusat dapat mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Penelitian Askam (2008) dan Arbie (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara DAK dan belanja modal. Berbeda dengan penelitian Verawaty, dkk. (2015) yang menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, maka dirumuskan hipotesis yaitu:

H₂: Dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pemerintah daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penelitian Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Hasil penelitian Askam (2008), Mawarni, dkk. (2013), dan Ni Luh Dina, dkk. (2014) juga sependapat bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan antara PAD terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil riset diatas maka dirumuskan hipotesis yaitu:

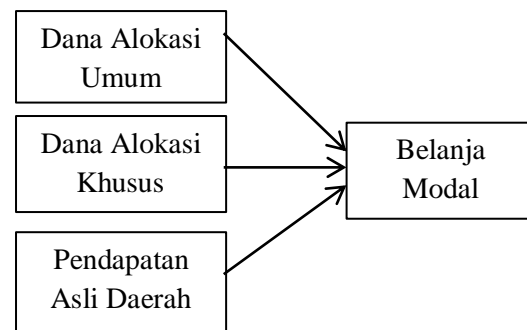
H₃: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

3. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda karena variabel yang digunakan lebih dari dua variabel yaitu DAU, DAK dan PAD.

Berikut adalah persamaan regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$



Gambar 1
Kerangka Pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap Belanja Modal

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, merupakan jenis penelitian yang analisis datanya menggunakan angka-angka, sekor dan diolah menggunakan metode statistik (Arbie, 2013). Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang digunakan dalam penelitian yang bersumber dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2013: 137). Obyek dalam penelitian ini berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat selama periode 2011 sampai 2015. Data dalam penelitian ini diperoleh dari [website www.djkd.depkeu.go.id](http://www.djkd.depkeu.go.id).

1. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Verawaty, dkk. (2015) dimana sebagai variabel independen dalam penelitian ini yaitu DAU, DAK, dan PAD. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal. Definisi Operasional variabel-variabel tersebut, yaitu :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dapat diukur dengan 2 indikator yaitu celah fiskal dan alokasi dasar.
- b. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dapat diukur dengan 2 indikator yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DAK tambahan.
- c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dapat diukur dengan 4 indikator yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.
- d. Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk mendanai kegiatan investasi (menambah aset). Belanja modal dapat diukur dengan 5 indikator yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal aset tetap lainnya.

D. HASIL PENELITIAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1: Hasil Analisis Statistik Deskriptif
(dalam jutaan rupiah)

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
DAU	126	1039	1161464	453000	157534.183
DAK	126	176	193813	77100	38690.224
PAD	126	1191	139260	17000	21426.568
BM	126	22365	650617	218000	117862.893

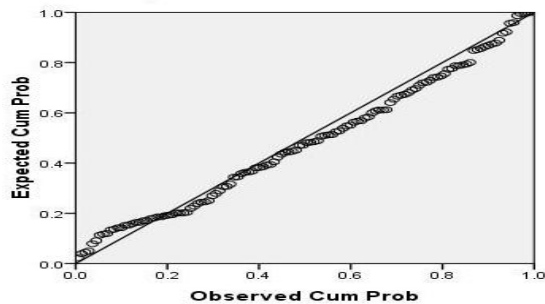
Sumber: Data sekunder diolah, 2016.

DAU terendah sebesar Rp 1.039.000.000 dan DAU tertinggi sebesar Rp 1.161.464.000.000 dengan rata-rata Rp 453.000.000.000 dan standar deviasi Rp 157.534.183.000. DAU terendah terdapat pada kabupaten Merauke tahun 2013 dan DAU tertinggi terdapat pada kabupaten Merauke tahun 2014. DAK terendah sebesar Rp 176.000.000 dan DAK tertinggi sebesar Rp 193.813.000.000 dengan rata-rata Rp 77.100.000.000 dan standar deviasi Rp 38.690.224.000. DAK terendah terdapat pada kabupaten Merauke tahun 2013 dan DAK tertinggi terdapat pada kabupaten Merauke tahun 2014.

PAD terendah sebesar Rp 1.191.000.000 dan PAD tertinggi sebesar Rp 139.260.000.000 dengan rata-rata Rp 17.000.000.000 dan standar deviasi Rp 21.426.568.000. PAD terendah terdapat pada kabupaten Mamberamo Raya tahun 2011 dan PAD tertinggi terdapat pada kabupaten Merauke tahun 2014. Belanja Modal terendah sebesar Rp 22.365.000.000 dan belanja modal tertinggi sebesar Rp 650.617.000.000 dengan rata-rata Rp 218.000.000.000 dan standar deviasi Rp 117.862.893.000. Belanja modal terendah terdapat pada kabupaten Maybrat tahun 2012 dan belanja modal tertinggi terdapat pada kabupaten Teluk Bintuni tahun 2014.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas



Gambar 2: Uji Normalitas

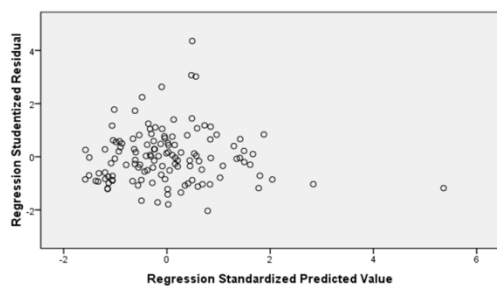
Sumber: Data sekunder diolah, 2016.

Berdasarkan uji normalitas pada gambar 2, terlihat dalam grafik normal P-P Plot titik-titik menyebar disekitar dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan karena telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Berdasarkan uji multikolinieritas pada tabel 3, menunjukkan bahwa semua variabel memiliki *tolerance value* >10% dan nilai VIF semua variabel <10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3: Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2016.

Berdasarkan uji heteroskedastisitas pada gambar 3, terlihat dalam grafik scatterplot titik-titik menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk

pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga dapat digunakan untuk menguji pengaruh DAU, DAK dan PAD.

d. Hasil Uji Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Hasil Uji Autokorelasi

Model	R Square	Adj. R Square	Std. Error	DW
1	.403	.389	9.216	1.415

Sumber: Data sekunder diolah, 2016.

Berdasarkan uji autokorelasi pada tabel 2, menunjukkan nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1.415, dibandingkan dengan nilai tabel DW dengan menggunakan kepercayaan 5%, jumlah sampel 126 dan jumlah variabel independen 3, akan menunjukkan nilai tabel batas bawah (dL) sebesar 1.661 dan nilai tabel batas atas (dU) sebesar 1.758. Sedangkan nilai 4-dU sebesar 2.242, maka dapat disimpulkan nilai DW lebih rendah dari nilai batas bawah (dL), $DW < dL < dU$ ($1.415 < 1.661 < 1.758$). Oleh karena itu dalam uji ini terdapat autokorelasi positif. Sehingga perlu dilakukan pengujian lebih mendalam terhadap penelitian dimasa mendatang.

3. Pengujian Hipotesis

a. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan uji regresi linier berganda yang terdapat pada tabel 3 dilihat dari nilai koefisien beta maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 78110.372 + 0.008DAU + 1.333DAK + 1.961PAD$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 78110.372 menyatakan bahwa variabel independen bersifat konstan, maka belanja modal sebesar 78110.372 juta rupiah.
- 2) Koefisien regresi variabel DAU (X1) sebesar 0.008, artinya

setiap DAU meningkat sebesar 1 rupiah, maka belanja modal (Y) akan meningkat sebesar 0.008 juta rupiah.

- 3) Koefisien regresi variabel DAK (X2) sebesar 1.333, artinya setiap DAK meningkat sebesar 1 rupiah, maka belanja modal (Y) akan meningkat sebesar 1.333 juta rupiah.
- 4) Koefisien regresi variabel PAD (X3) sebesar 1.961, artinya setiap DAU meningkat sebesar 1 rupiah, maka belanja modal (Y) akan meningkat sebesar 1.961 juta rupiah.

b. Uji Statistik F

Berdasarkan uji Anova atau uji statistik F pada tabel 3, diperoleh F hitung sebesar 27.479 dengan tingkat probabilitas 0.000 (signifikan). Karena probabilitas menunjukkan hasil jauh lebih kecil dari standar signifikan yaitu 0.05, maka model regresi dapat digunakan dan dapat dikatakan bahwa PAD, DAU, DAK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

c. Uji Statistik t

Berdasarkan uji statistik t pada tabel 3, dapat dilihat pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dari nilai probabilitas signifikan sebagai berikut:

Tabel 3: Hasil Uji t, Uji F, Uji R²

	B	T	Collinearity Statistics		Sig.
			Tolerance	VIF	
Const.	78110.372	3.077			.003
DAU	.008	.114	.509	1.963	.909
DAK	1.333	4.773	.582	1.717	.000
PAD	1.961	4.623	.823	1.216	.000
F Hitung = 27.479					.000
Adjusted R2 = 0.389					

Sumber: Data sekunder diolah, 2016.

- 1) Variabel DAU menunjukkan nilai signifikan sebesar 0.909 , hal ini jauh diatas standar signifikan yaitu

0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

- 2) Variabel DAK menunjukkan nilai signifikan sebesar 0.000 , hal ini jauh dibawah standar signifikan yaitu 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.
- 3) Variabel PAD menunjukkan nilai signifikan sebesar 0.000, hal ini jauh dibawah standar signifikan yaitu 0.05. Sehingga dapat disimpulkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

d. Koefisien Determinasi

Berdasarkan uji *adjusted R square* pada tabel 3, menunjukkan nilai *adjusted R square* 0.389, hal ini dapat diartikan bahwa 38,9% variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel DAU, DAK, dan PAD sedangkan sisanya 61,1 % dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

E. Pembahasan

Hasil pengujian ini tidak mendukung hipotesis penelitian, dimana dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Pengujian secara parsial DAU terhadap belanja modal menunjukkan nilai t hitung sebesar 0.114 dengan nilai probabilitas (Sig.) = 0.909 lebih besar dari standar signifikan 0.05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian Verawaty, dkk. (2015) , namun tidak sependapat dengan penelitian Arbie (2013), Ni Luh Dina, dkk. (2013) dan Askam (2008) yang menyatakan bahwa

dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat baik apabila pemerintah daerah memberikan peningkatan terhadap pelayanan masyarakat. Sehingga perlu pengalokasian pembangunan publik dalam APBD terutama di bagian belanja modal. Dalam penelitian ini DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal, hal tersebut dikarenakan pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah menggunakan dana alokasi khusus. Terdapat aturan khusus kegunaan DAK yang telah ditetapkan terutama untuk dialokasikan pada belanja modal. Sehingga besar kecilnya DAU yang diberikan tidak mempengaruhi belanja modal.

Hasil pengujian ini mendukung hipotesis penelitian, dimana dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal. Pengujian secara parsial DAK terhadap pengalokasian belanja modal menunjukkan nilai t hitung sebesar 4.773 dengan nilai probabilitas (Sig.) = 0.000 lebih kecil dari standar signifikan 0.05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian Arbie (2013), Askam (2008) dan Ni Luh Dina, dkk. (2013), namun tidak sependapat dengan penelitian Verawaty, dkk. (2015) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Dana alokasi khusus yang merupakan salah satu dana perimbangan dalam APBD ini digunakan untuk membiayai kebutuhan khusus di daerah tertentu. DAK sebagai dana untuk kegiatan pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana serta perbaikan ekonomi daerah sehingga

DAK dapat membantu pemda dalam pengalokasian belanja modal.

Hasil pengujian ini mendukung hipotesis penelitian, dimana pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal. Pengujian secara parsial PAD terhadap pengalokasian belanja modal menunjukkan nilai t hitung sebesar 4.623 dengan nilai probabilitas (Sig.) = 0.000 lebih kecil dari standar signifikan 0.05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian Mawarni, dkk. (2013), Askam (2008) dan Ni Luh Dina, dkk. (2013), namun tidak sependapat dengan penelitian Arbie (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Papua barat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. PAD memberikan kontribusi yang besar dalam kegiatan pembangunan yang di alokasikan pada belanja modal. Terbukti pada hasil uji statistik deskriptif yang menunjukkan nilai minimum/terendah, nilai PAD lebih tinggi dibandingkan dengan DAU dan DAK. Sehingga dalam meningkatkan PAD, pemerintah daerah perlu meningkatkan pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dll) serta retribusi daerah.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa alokasi belanja modal dalam pemerintah daerah

- b. tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya penerimaan dana alokasi umum yang diberikan pemerintah pusat.
- c. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa alokasi belanja modal dalam pemerintah daerah dipengaruhi oleh besar kecilnya penerimaan dana alokasi khusus yang diberikan pemerintah pusat.
- d. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. Sumber penerimaan daerah berasal dari retribusi, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2. Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini yang telah dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen untuk menguji pengaruh terhadap belanja modal yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Penelitian ini mengambil sampel dengan rentang periode 5 tahun yaitu 2011-2015, perlu rentang waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan

mampu memberikan gambaran yang lebih luas dan lengkap.

- c. Penelitian ini hanya mengambil sampel beberapa daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat yang termasuk dalam daftar daerah tertinggal tahun 2015 sampai tahun 2019.

3. Saran

- a. Berdasarkan uji autokorelasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya autokorelasi positif, maka perlu dilakukan pengujian lebih mendalam untuk penelitian selanjutnya.
- b. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan dapat menambahkan variabel independen lain untuk menguji pengaruh belanja modal seperti Dana Bagi Hasil (DBH) serta bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel beberapa daerah lain yang termasuk dalam daftar daerah tertinggal tahun 2015 sampai tahun 2019. Daerah tertinggal lain terdapat pada Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi NTB, Provinsi NTT, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbie Gugus Wandira. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* Vol 2 (1). Universitas Negeri Semarang.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- David Harianto & Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Perkapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Farah Marta Yovita. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010). *Diponegoro Journal Of Accounting Semarang*. UNDIP
- Mawarni, Darwanis dan Syukriy Abdullah. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi* Vol 2 (2). Banda Aceh.
- Ni Luh Dina S.M., Wayan Cipta & I Wayan Suwendra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012. *E-Jurnal Jurusan Manajemen* Vol 2. Singaraja.
- Askam Tuasikal. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol 1 (2). Universitas Pattimura Ambon.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Peraturan Pemerintahan. Jakarta.
- Priyo Hari Adi. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Verawaty, Citra Indah M. dan Mela Sari. 2015. Determinan Pengalokasian Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*. Medan.

